



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DI PEMERINTAHAN
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

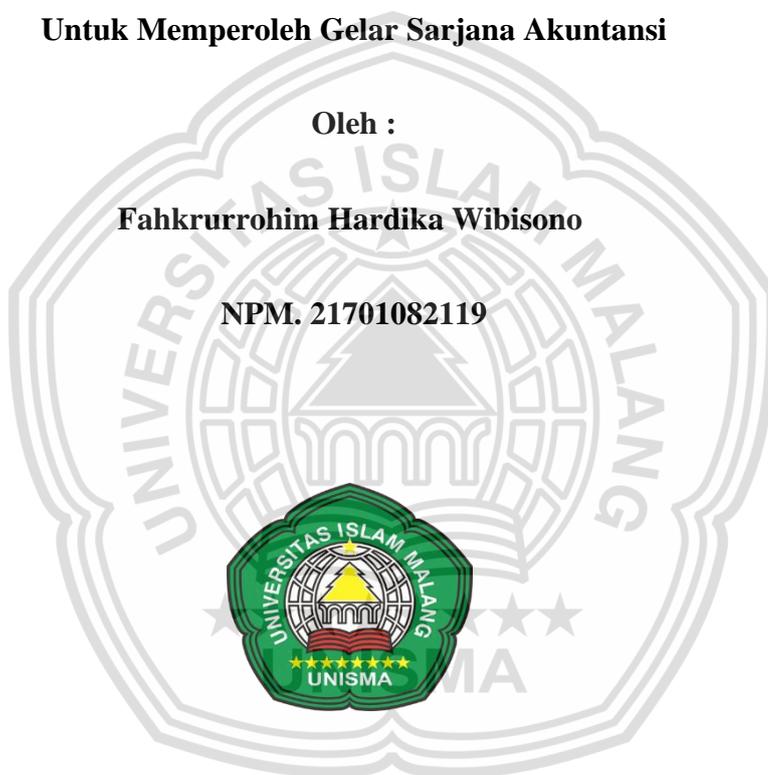
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Fahkrurrohim Hardika Wibisono

NPM. 21701082119



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2022

ABSTRAK

Fahkrurrohim Hardika Wibisono. Dalam penelitian ini bertujuan menganalisis suatu pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah atas kualitas laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Malang. Populasi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebanyak 40 orang yang bekerja dibidang akuntansi. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Sampel yang dipilih sebanyak 36 orang dengan data yang diambil menggunakan metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan SPSS 24. Uji yang digunakan dalam penelitian ini Pengujian secara simultan atau Bersama (t) , uji koefisien determinasi (R^2), dan Pengujian secara parsial (f). Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji t dalam variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, dalam uji f dua variabel memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Malang

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas laporan keuangan, Pemerintahan Kabupaten Malang





ABSTRACT

Fahkrurrohim Hardika Wibisono. *This research aims to analyze the effect of internal control and regional financial accounting systems on the quality of financial reports in the Malang Regency Government. The population used in conducting this research was 40 people who work in accounting. The data collection technique in this study was purposive sampling. The sample selected was 36 people with data collected using the questionnaire method. The test used in this research is simultaneous or joint testing (t), the test of the coefficient of determination (R^2), and partial testing (f). The results showed that the t-test in the independent variable had a significant effect on the dependent variable. Meanwhile, in the f-test two variables influence the quality of financial reports in the Malang Regency Government.*

Keywords: *Internal Control System, Regional Financial Accounting System, quality of financial statements, Government of Malang Regency.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era perubahan reformasi pengelolaan laporan keuangan yang mengalami peningkatan peraturan secara terus menerus. Perubahan regulasi secara terus menerus bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintan yang bersih (*clean governance*). Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memiliki pedoman kepada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah peningkatan dalam kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintahan, dan mewujudkan laporan keuangan dan kinerja dalam pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintahan daerah harus menetapkan tujuan dan sasaran dengan membuat perencanaan kegiatan yang baik untuk mencapai yang sesuai untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran.

Menurut Kemenkeu adanya peningkatan dalam kualitas laporan keuangan pemda selama keadaan krisis di tahun 2021. Sebanyak 482 dari 542 atau sekitar 89,2 persen laporan keuangan pemerintahan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Terdiri dari 33 pemerintahan provinsi, 88 pemerintahan kota, dan 365 pemerintahan kabupaten (Menkeu: *Kualitas Laporan Keuangan Pemda Membaik, 89 Persen Dapat Opini WTP - Tribunnews.Com, n.d.*)

Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban untuk melakukan pengelolaan sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dalam sumber daya publik yang telah diberi mandat (Rahmawati, et.all, 2018). Bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan suatu penyelenggaraan pemerintahan tertulis dalam peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan selain itu juga tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu cara agar mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dalam suatu pemerintahan, baik di pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berbentuk laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria sesuai dengan Standar Akuntansi Publik (SAP) yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keefektifitas sistem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan terhadap pemberian opini dan kewajaran informasi (Evicahyani & Setiawina, 2016).

Sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi mutlak harus jadi hal utama dalam melakukan kegiatan operasional dan kinerja memerlukan sebuah hal yang khusus dalam memberikan kemudahan dan batasan dalam ketentuan khusus pada setiap pelaksanaan kegiatan. Sistem Pengendalian intern digunakan untuk mempermudah dilakukannya analisis terhadap sebuah permasalahan yang ada dan

terjadi dalam proses pencapaian suatu tujuan yang diketahui secara jelas. Dalam hal meningkatkan kinerja pemerintahan senantiasa menghadapi masalah yang secara luas yaitu korupsi, kesalahan administrasi, dan pengelolaan kesalahan administrasi. Menurut (Faishol, 2016) Sistem Pengendalian Internal memiliki beberapa elemen yang ditinjau adalah lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi. Salah satu elemen yang ada dalam sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian dijadikan dasar dalam melakukan suatu kegiatan operasional dalam entitas yang aman, sehat dan berkembang secara wajar. Lingkungan pengendalian juga membantu pengurus dan pengelolaan dalam menjaga asset, menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ekonomis, efektif, dan efisien.

Dalam penelitian sebelumnya oleh (Mokoginta et al., 2017) yang memiliki kaitan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah dijalankan dengan baik tetapi penerapannya belum efektif dan efisien sehingga dapat berpengaruh terhadap berkurangnya kualitas dalam laporan keuangan. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti & Erawati, (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap laporan keuangan di Kabupaten Badung.

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu suatu rangkaian kegiatan prosedur yang diawali dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga menjadi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan (Ardianto & Eforis,

2019). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Defitri, 2018) yang memiliki kaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dalam laporan keuangan di Pemerintahan Kota Solok mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berjalan efektif.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang dilaporkan setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan. Terdapat 4 opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (WP), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Dalam setiap penyusunan laporan keuangan diharapkan agar berpedoman pada standar yang telah disesuaikan. Standar yang dipakai dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan pemerintahan daerah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi ada dalam laporan keuangan pemerintahan daerah dapat dikatakan berkualitas jika kriteria ini dapat dipenuhi yaitu relevan (*relevance*), andal(*reability*), dapat dipahami (*understandability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Standar akuntansi pemerintahan merupakan syarat yang dapat dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia yang dapat lebih ditingkatkan (Kiranayanti & Erawati, 2016)

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Dimana untuk menghasilkan suatu hasil laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Jika sistem akuntansi belum

dipahami maka akan dapat menghambat penyusunan. Tetapi dalam kenyataannya laporan keuangan pemerintahan daerah masih ada banyak disajikan data-data yang masih yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang sudah berlaku secara umum. Wajar ada banyak laporan keuangan daerah yang masih mendapatkan opini tidak wajar dan *disclaimer* dari BPK karena dalam melakukan penyusunan masih ada yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dan belum terpenuhinya kelengkapan yang telah ditentukan serta bukti-bukti transaksi yang masih kurang ditemukan.

Akuntansi keuangan daerah memiliki banyak peranan penting dalam pengelolaan suatu keuangan daerah agar dapat berjalan sebagaimana semestinya. Selama ini pelaporan keuangan, baik dipusat maupun pemerintahan daerah yang terkesan belum terpenuhi kebutuhan informasi oleh pemakainya. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini karena berdasarkan laporan audit BPK pada tahun 2021 opini yang diberikan kepada laporan keuangan Kabupaten Malang Tahun 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP diberikan kepada yang laporan keuangan pemerintahan yang sudah sesuai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, keefektifitas sistem, pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Kabupaten Malang mendapatkan WTP selama 7 tahun berturut, namun dalam laporan keuangan tahun 2020 ditemukan adanya kelemahan di sistem pengendalian intern dan ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian yang lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan di Kabupaten Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat mempengaruhi kualitas dalam laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Malang?
- b. Apakah Sistem Pengendalian Intern dapat mempengaruhi kualitas dalam laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Malang?
- c. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat mempengaruhi kualitas dalam laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Menganalisa pengaruh setiap penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Malang

- b. Menganalisa pengaruh penerapan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Malang
- c. Menganalisa pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap berkualitasnya laporan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan dalam referensi serta menambah informasi dalam pentingnya penerapan suatu Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dapat berpengaruh kualitas laporan keuangan daerah

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan, dan dapat memberikan kontribusi dalam bagi praktik akuntansi di Indonesia pada masa mendatang dan memberikan wawasan bagi SKPD terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam keefektifitasan laporan keuangan daerah.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Intern (X1) dan Sistem Akuntansi Keuangan (X2) terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y). berdasarkan hasil perhitungan sampel menggunakan slovin dan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara simultan dalam penelitian ini variabel dependen (X1) Sistem Pengendalian Intern dan (X2) Sistem Akuntansi Keuangan secara simultan (bersama – sama) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)
2. Variabel Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Malang
3. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Malang

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada Kabupaten Malang yang berfokus Kualitas Laporan Keuangan saja sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.
2. Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini hanya melalui google form sehingga peneliti tidak bisa secara langsung memberikan kepada responden karena penelitian dilakukan pada masa pasca pandemi Covid-19 yang sebisa mungkin menghindari kontak tatap muka langsung. Karena kelemahan kuesioner adalah responden bisa saja memberikan jawaban yang asal – asalan sehingga mempengaruhi kualitas data yang didapat.
3. Berdasarkan hasil uji R square masih terdapat 47,5% yang mempengaruhi hasil penelitian, sehingga masih terdapat variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian ini

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah didapat, peneliti sebagai pelaksana penelitian ini juga menyadari banyaknya kekurangan – kekurangan yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hal lebih maksimal. Sehingga, saran untuk penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan tidak berfokus pada suatu batasan – batasan tertentu (satu kabupaten saja) sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode pengumpulan data tambahan sehingga lebih dapat memperkuat adanya pengaruh antar

variabel independen dan dependen dalam penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengkaji dengan lebih baik serta komprehensif dalam memilih variabel untuk model penelitian, misalkan dengan menggunakan variabel lain diluar model penelitian, Dengan menambahkan variabel misalnya sumber daya manusia, atau pengaruhnya kemajuan teknologi



DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN dilakukan secara kontinyu pada setiap periode tertentu dala. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3, 403–428.
- Faishol, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 205–212.
- Ihsanti, E. (2014). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*.
- Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Menkeu: Kualitas Laporan Keuangan Pemda Membaik, 89 Persen Dapat Opini WTP - Tribunnews.com.* (n.d.). Retrieved November 15, 2021, from <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/14/menkeu-kualitas-laporan-keuangan-pemda-membaik-89-persen-dapat-opini-wtp>
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 874–890. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18282.2017>
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem

Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17.
<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097>

Rohmah, L., Noor Shodiq Askandar, & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 09(05), 43–51.

Syifa Nurillah, A., & Muid, D. (2014). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. www.bpk.go.id

Yendrawati, R. (2013). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING*.

